

MENUJU EFEKTIVITAS KEGIATAN DIKLAT KEGIATAN P4TK BMTI BANDUNG DI LUAR KAMPUS

**BY
NASIN EL-KABUMAIN**

Spektakuler; demikian istilah yang tepat untuk menggambarkan kebijakan dan target-target yang mencengangkan dunia pendidikan kita. Salah satunya ialah penataan sekolah dengan rasio jumlah SMA dan SMK yang semula 70:30 berbanding terbalik menjadi 30:70 pada tahun 2020-2025. Perubahan itu dilakukan tentu bukan tanpa alasan. Tapi, yang jelas untuk mewujudkannya diperlukan kerja yang ekstra keras. Semua lembaga terkait harus menyingsingkan lengan, berjibaku, berbenah diri sesuai dengan peran dan partisipasinya masing-masing sehingga apa yang diharapkan menjadi sebuah keniscayaan.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), khususnya Bidang Mesin dan Teknik Industri (BMTI) diharapkan ikut berperan serta memberikan partisipasi aktifnya untuk menyokong perubahan yang harus dilakukan. Kenyataan di lapangan, masih banyak guru yang memerlukan peningkatan kualitas untuk memenuhi salah satu kebijakan pokok, yaitu peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan.

Patut menjadi catatan, bahwa rasio jumlah guru yang harus ditingkatkan kemampuannya dengan kemampuan daya tampung P4TK, khususnya BMTI sangat jauh dari kata 'seimbang.' Diperlukan waktu puluhan tahun untuk memanggil semua guru menikmati 'sajian' materi peningkatan kompetensinya. Tanpa upaya terobosan, maka upaya peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan akan mandeg di tempat. Rasio perubahan jumlah SMA dan SMK, hanya akan berubah institusinya, tapi tidak meningkatkan kompetisi lulusan.

Sebagai contoh, program DIPA P4TK BMTI Bandung tahun 2007 hanya mampu memanggil sekitar 1.000 untuk mengikuti diklat peningkatan kompetensinya. Bisa dibayangkan, berapa tahun diperlukan untuk meningkatkan kualitas guru SMK yang

jumlahnya mencapai 152.442 orang (Rekap guru tahun 2005, Balitbang Depdiknas). Bisa dibayangkan, ketika para guru itu baru menunggu giliran, maka kebijakan pemerintah pusat sudah berubah. Akhirnya, para guru hanya menjadi 'simatupang' siang malam menunggu panggilan, dan tidak pernah terpanggil untuk mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi.

P4TK BMTI Bandung mengeluarkan kebijakan yang boleh dibilang spektakuler, untuk menyambut kebijakan yang spektakuler. Selain memperkuat diri dengan meningkatkan kompetensi para widyaiswara, baik melalui kenaikan jenjang pendidikan, mendatangkan para ahli pendidikan untuk mempertajam berbagai kemampuan dengan pembentukan satgas-satgas (task force) yang siap ditugaskan atau dipanggil ke daerah-daerah yang memerlukan bimbingan, maka P4TK BMTI Bandung juga merintis pembentukan Workstation di daerah-daerah.

Pembentukan Workstation ini merupakan terobosan untuk meningkatkan partisipasi guru dalam kegiatan peningkatan mutu pendidikan. Dengan pembentukan Work Station yang biaya kegiatannya bisa dilakukan secara 'sharing' antara P4TK BMTI dengan daerah, kegiatan ini menjadi sangat efektif dengan beberapa alasan yang sangat rasional.

Pertama, pihak sekolah atau Dinas setempat bisa menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Pihak Dinas bisa merancang program kegiatan diklat untuk diusulkan kepada P4TK, yang akan mengirimkan tenaga pengajar yang relevan dengan kebutuhan daerah. Sebagai contoh, Kabupaten Kolaka, yang berdekatan dengan Tambang Nikel Pomalaa, bisa memilih diklat Hidrolik Pneumatik, Programable Logic Control (PLC), Pemeliharaan Utilitas Pompa dan Kompresor atau Distribusi Control System (DCS). Daerah Panajam lebih memilih memperkuat Teknik Pendingin. Daerah Cilacap lebih memilih diklat Otomotif, Daerah Aceh lebih memilih diklat Penulisan Karya Ilmiah dan lain-lain. Sebagai contoh, Workstation Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, melaksanakan kegiatan Workstation Pengukuran Kinerja Kepala Sekolah yang dilaksanakan tanggal 4 s.d. 17 Oktober 2006. Peserta diklat ialah kepala SD, kepala SMP, kepala SMA dan kepala SMK. Materi pokok yang dipelajari ialah KTSP, Kepemimpinan, Manajemen Sekolah Efektif, Instrumen valuasi Kinerja Kepsek dan Self Evaluasi Kepsek.

Kedua, partisipasi guru yang mengikuti kegiatan diklat lebih banyak, karena diselenggarakan di daerah sendiri, sehingga tidak memerlukan biaya transportasi yang besar. Para guru tidak perlu menginap di hotel. Mereka bisa pulang-pergi dari rumah masing-masing. Hal ini, bisa menurunkan biaya akomodasi. Para guru juga tidak meninggalkan sekolah terlalu lama. Mereka bisa mengikuti pelatihan dan praktek langsung di sekolah masing-masing. Tentu saja, kegiatan ini efektif untuk diklat yang tidak membutuhkan peralatan praktek seperti mesin-mesin.

Ketiga, biaya kegiatan bisa ditekan. Baik biaya akomodasi, transportasi maupun biaya-biaya lain. Biaya tersebut bisa dialihkan untuk kegiatan lain, yang berkaitan dengan peningkatan kualitas guru dan sekolah. Biaya kegiatan juga ditanggung bersama antara DIPA P4TK BMTI dengan dinas setempat. Sebagai contoh, kegiatan Workstation Diklat Informatin Communication Technology, Diklat Kewirausahaan dan Diklat Teknik Perabot bagi guru SMK Kabupaten Bengkalis dibebankan kepada DIPA P4TK BMTI tahun 2006 dengan DAS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.

Keempat, mempererat tali silaturahmi antara pusat dan daerah, membina kesepahaman, bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Semakin tinggi tingkat kebersamaan dalam memikul tanggung jawab ini, maka diharapkan sasaran pendidikan menuju peningkatan kompetitif akan menjadi kenyataan.

P4TK BMTI beserta Dinas Pendidikan di daerah telah membentuk Workstation di Banda Aceh, Sumatera Selatan, Banten, Papua, dan Panajam Kalimantan Timur. Langkah P4TK BMTI mudah-mudahan diikuti oleh P4TK lainnya, sehingga terobosan diklat di luar kampus semakin mendekatkan rasio jumlah guru yang harus dibina dengan kemampuan daya tampung P4TK.

Selain kegiatan Workstation, P4TK BMTI juga mendapat amanat dari Direktorat Pembinaan SMK untuk melakukan pembimbingan terhadap 30 SMK Bertaraf Internasional. Para Widyaiswara yang memenuhi persyaratan tertentu, dikirim ke SMK untuk membantu pihak sekolah menyiapkan sekolah agar memenuhi kriteria SMK Bertaraf Internasional sesuai dengan profil yang sudah ditentukan. Setidaknya ada 12 komponen ukuran kinerja 2007 yang harus disiapkan pihak sekolah ialah komponen ISO, TUK, Score TOEIC siswa rata-rata >400, 4 pelajaran produktif dalam Bahasa Inggris,

Lingkungan berbasis green school, adanya bengkel standar, adanya bengkel *advance*, *teaching factory*, program ICT, Partner Institusi LN + DN, lulusan ke luar negeri dan *digital libray/self access study*.

Terobosan yang dilakukan oleh P4TK BMTI, tidak saja melakukan kegiatan bersama dengan dana sharing, atau dana DIPA P4TK untuk diklat daerah seperti program Manajemen Bengkel, tapi juga menyiapkan satuan tugas atau task force yang siap memenuhi panggilan dari daerah. Kepala P4TK BMTI akan memberikan tugas kepada widyaiswara untuk memenuhi permintaan sekolah, sesuai dengan tenaga yang dibutuhkan sekolah.

Demikianlah sekelumit, terobosan P4TK BMTI Bandung dalam kerangka memperkecil jurang ketimpangan asumsi jumlah guru dengan kemampuan daya tampung P4TK, yang memiliki visi dan misi memenuhi pilar kebijakan kedua, yakni peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan.

